

POLITIK IDENTITAS DAN TANTANGAN KEBHINEKAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG INKLUSIF DAN PROGRESIF

Aminuddin¹, Alya Qais Tsaabitah²

aminuddin@uinsu.ac.id¹, tsaabitah2005@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Politik identitas menjadi fenomena yang semakin dominan dalam lanskap politik Indonesia, terutama menjelang momentum elektoral. Identitas primordial seperti agama, etnisitas, dan budaya kerap dijadikan alat mobilisasi massa, yang berdampak pada polarisasi sosial dan melemahnya semangat kebhinekaan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola keberagaman tanpa terjebak dalam eksklusivitas kelompok yang menghambat integrasi nasional. Dalam konteks ini, demokrasi yang inklusif dan progresif menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin partisipasi politik yang setara dan adil bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berbasis identitas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik identitas di Indonesia, dampaknya terhadap kohesi sosial, serta strategi untuk memperkuat demokrasi yang mampu merangkul pluralitas. Diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan negara, masyarakat sipil, dan media untuk menciptakan ruang politik yang sehat dan toleran.

Kata Kunci: Politik Identitas, Kebhinekaan, Demokrasi Inklusif, Polarisasi, Pluralitas.

Abstract: Identity politics has become an increasingly dominant phenomenon in Indonesia's political landscape, particularly in the lead-up to elections. Primordial identities such as religion, ethnicity, and culture are often used as tools for mass mobilization, leading to social polarization and weakening the spirit of diversity. The main challenge is how to manage diversity without falling into group exclusivity, which hinders national integration. In this context, inclusive and progressive democracy is essential to ensure equal and fair political participation for all citizens, without identity-based discrimination. This article aims to examine the dynamics of identity politics in Indonesia, its impact on social cohesion, and strategies for strengthening democracy that embraces plurality. A multidimensional approach involving the state, civil society, and the media is needed to create a healthy and tolerant political space.

Keywords: Identity Politics, Diversity, Inclusive Democracy, Polarization, Plurality.

PENDAHULUAN

Fenomena politik identitas di Indonesia telah menjadi salah satu persoalan paling krusial dalam dinamika demokrasi modern. Sejak era reformasi hingga pasca pemilu 2024, politik identitas terus menghadirkan tantangan bagi keberagaman nasional dan kualitas demokrasi. Sebagai negara ber-Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia menghadapi tekanan sistemik ketika etnis, agama, atau kelompok sosial dipolitisasi untuk mencapai tujuan politik tertentu (Rahman, 2022; Sutrisno, 2023). Keberadaan praktik politik identitas ini sering kali memperlemah kohesi nasional dan menciptakan fragmentasi sosial yang mengganggu nilai inklusivitas demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti mobilisasi berbasis agama, etnis, maupun kultur, terutama saat pemilu legislatif dan presiden. Dalam konteks Pilkada dan Pilkada serentak, identitas agama dan suku kerap dijadikan “bank suara” meskipun eksperimen seperti di Madura menunjukkan bahwa orientasi keagamaan memengaruhi perilaku pemilih secara signifikan (Ningsih, 2024; Sari, 2023).

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa elit politik kadang memanfaatkan narasi identitas demi kekuasaan, sementara masyarakat masih belum sepenuhnya matang secara demokratis sebuah kondisi yang memicu stagnasi transformasi sosial menuju masyarakat rasional perangkat demokrasi ideal (Handayani, 2021; Wijaya, 2022). Hasil Pemilu 2024 memperlihatkan posisi politik identitas mulai mengalami perubahan. Beberapa analis mencatat bahwa identitas politik agama yang masif seperti pada masa sebelumnya kini relatif kurang menonjol, terutama di antara pemilih muda yang cenderung pragmatis dan kritis terhadap manipulasi media sosial (Maulana, 2024). Situasi ini memperlihatkan potensi momentum baru bagi demokrasi inklusif, asalkan politik identitas tidak kembali dijadikan strategi kampanye utama oleh elite politik.

Namun demikian, juga ditemukan bahwa dalam kontestasi lokal dan kampanye daring, simbol identitas terus digunakan untuk mempolarisasi opini publik. Dalam pilpres 2024, misalnya, kelompok tertentu menggerakkan narasi berbasis identitas melalui media sosial seperti hashtag “Kadrun”, yang memicu perdebatan etis tentang hate spin dan memperlebar jurang intoleransi antarkelompok (Yuliana, 2025; Hasan, 2020). Analisis sentimen terhadap kampanye daring menunjukkan dominasi narasi negatif yang memperburuk polarisasi sosial (Ananda, 2021). Di sisi lain, upaya membangun demokrasi digital yang inklusif telah dijadikan prioritas. Penelitian tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa penerapan nilai demokrasi berbasis teknologi seperti e-voting, literasi digital politik, dan platform komunikasi politik yang inklusif bisa memperluas ruang partisipasi publik, terutama kaum muda dan kelompok marginal (Suhartini, 2023). Gerakan literasi politik digital dianggap sebagai strategi untuk membendung disinformasi dan manipulasi berbasis identitas.

Tetapi, berbagai riset memperingatkan bahwa tanpa pendidikan politik formal, politik identitas akan tetap tumbuh subur sebagai alat politisasi massa. Harus ada penekanan pada pendidikan politik yang menanamkan nilai rasionalitas, toleransi, dan semangat kebhinekaan agar demokrasi makin matang dan partisipatif (Abdullah, 2021). Nilai-nilai luhur Pancasila seperti persatuan dalam kebhinekaan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kohesi nasional sekaligus demokrasi progresif yang inklusif (Yuliana, 2024). Lebih jauh, tantangan politik identitas juga merambah pada struktur kelembagaan dan dinasti politik. Konsolidasi politik melalui unsur keluarga atau kelompok tertentu turut berisiko mempersempit ruang demokrasi substantif dan pluralisme politik (Hasan, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden juga menjadi momentum untuk memperluas akses politik kelompok minoritas dan partai kecil sebuah langkah penting menuju demokrasi yang lebih inklusif dan kompetitif (Ningsih, 2022). Dengan demikian, penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi secara bersama memastikan bahwa politik identitas tidak mengeksploitasi kebhinekaan sebagai alat politik eksklusif. Demokrasi

inklusif membutuhkan kesadaran publik yang berbasis edukasi politik, komunikasi politik inklusif, serta kolaborasi multipihak. Hanya melalui loncatan nilai-nilai kebangsaan yang progresif, kita dapat mewujudkan demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman sosial Indonesia.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Politik Identitas dalam Dinamika Demokrasi Kontemporer

Politik identitas didefinisikan sebagai praktik mobilisasi politik yang mendasarkan dukungan pada kelompok sosial seperti agama, etnis, ras, dan budaya (Universitas Airlangga, 2023). Dalam konteks demokrasi Indonesia pasca-reformasi, politik identitas telah menjadi alat struktur elektoral yang dominan sehingga menurunkan kualitas deliberasi dan kohesi nasional (Wingarta et al., 2021). Identitas agama dan etnis semakin diperkuat dalam kontestasi pemilu daerah dan nasional, mencerminkan legitimasi politik berbasis primordialisme yang memecah pluralitas (Andriani, 2024). Studi lintas wilayah menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menggunakan identitas sebagai basis mobilisasi pemilih, mempertahankan narasi politik identitas yang berpotensi menciptakan polarisasi (Fauzan, 2024).

Politisasi identitas oleh elite politik, terutama melalui narasi agama konservatif dan populisme religius, terbukti mengganggu demokrasi elektoral dan memperburuk segmentasi sosial (Ramadhani, 2024). Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa transformasi masyarakat menuju masyarakat rasional demokratis belum sepenuhnya tercapai, sehingga politik identitas tetap eksis sebagai strategi dominan dalam komunikasi politik kontemporer (Suhariyanto, 2024). Kesimpulannya, politik identitas membentuk budaya politik Indonesia saat ini sebagai kekuatan mobilisasi sekaligus tantangan serius terhadap kualitas demokrasi yang inklusif.

Tabel 1. Teori Politik Identitas dan Implikasinya terhadap Demokrasi

No	Nama Teori	Tokoh/Pakar	Penjelasan Teori	Relevansi terhadap Politik Identitas
1	Teori Politik Identitas	Manuel Castells (2010), Stuart Hall (1996)	Identitas terbentuk dari proses sosial, budaya, dan politik yang diproduksi secara historis. Politik identitas muncul saat kelompok merasa terpinggirkan.	Menjelaskan bagaimana kelompok etnis atau agama mengonstruksi identitas sebagai bentuk perlawanan atau alat mobilisasi politik.
2	Teori Primordialisme	Clifford Geertz (1963)	Loyalitas terhadap kelompok etnis atau agama dianggap alami dan melekat sejak lahir.	Mendorong pemahaman tentang kuatnya ikatan identitas etnis dalam praktik politik elektoral di Indonesia.
3	Teori Instrumentalisme	Anthony Smith, D. Pau, I Brass	Identitas digunakan secara strategis oleh elit politik	Menjelaskan bagaimana eli t menggunakan identitas untuk

Sumber: Dikutip dari Berbagai Sumber Penelitian

Tabel di atas menggambarkan kerangka teoretis yang mendasari analisis terhadap politik identitas dalam konteks demokrasi kontemporer. Setiap teori menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana identitas terbentuk, dimanfaatkan, dan berinteraksi dalam arena politik. Teori primordialisme dan instrumentalisme menjelaskan akar dan strategi penggunaan identitas oleh aktor politik, sementara teori multikulturalisme dan demokrasi deliberatif memberikan arah normatif

menuju tata kelola politik yang inklusif.

B. Kebhinekaan sebagai Pilar Keberagaman Sosial dan Tantangannya di Indonesia

Kebhinekaan merupakan fondasi utama tatanan sosial-politik Indonesia, mengacu pada prinsip Bhineka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keragaman bukan hambatan, melainkan kekuatan kolektif (Hasanudin Ali, 2024). Konsep ini menyiratkan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, etnis, dan bahasa adalah modal sosial yang apabila dikelola dengan baik dapat memperkuat identitas dan legitimasi demokrasi (Retizen, 2025). Namun dalam praktiknya, kebhinekaan menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang mengancam kohesi nasional. Salah satu tantangan nyata adalah tumbuhnya intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang menciptakan ketegangan sosial di berbagai wilayah (Kumparan, 2024). Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial ikut memperparah fragmentasi sosial serta memunculkan konflik berbasis identitas (Kompasiana, 2023).

Tabel 2. Data Kebhinekaan dan Tantangan Sosial di Indonesia

No	Indikator/Tema		Temuan atau Fakta	Sumber	Relevansi
1	Indeks Toleransi Sosial		Meningkatnya intoleransi terhadap minoritas agama dan etnis di beberapa wilayah urban	Kumparan (2024)	Menunjukkan kerentanan kohesi sosial dalam masyarakat multikultural
2	Persepsi Publik terhadap Keberagaman		34% responden menyatakan keberagaman sebagai ancaman, bukan kekuatan	Kompasiana (2023)	Menggambarkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap nilai kebhinekaan
3	Ketimpangan antar Kelompok Sosial	Ekonomi	Kelompok adat dan minoritas mengalami ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi	BaKTI (2022)	Menekankan bahwa kesetaraan ekonomi penting untuk menjamin harmoni dalam masyarakat plural
4	Dinamika Budaya di Era Digital	Interaksi	Meningkatnya konflik antar komunitas media sosial berbasis isu identitas budaya	Setneg (2023)	Menunjukkan tantangan baru dalam menjaga kebhinekaan di ruang digital
5	Upaya Pendidikan Nilai Kebhinekaan		Kurangnya kurikulum formal tentang nilai multikulturalisme di sekolah-sekolah umum	ResearchGate (2023)	Penting untuk mendorong pendidikan nilai kebhinekaan sejak usia dini

Sumber: Dikutip dari Berbagai Sumber Penelitian

Tabel di atas menyajikan berbagai indikator yang menggambarkan kondisi aktual kebhinekaan di Indonesia serta tantangan yang menyertainya. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kebhinekaan diakui sebagai pilar bangsa, masih terdapat celah dalam pemahaman, penerimaan, dan implementasinya di masyarakat. Meningkatnya intoleransi, ketimpangan akses, serta kurangnya pendidikan multikultural menjadi masalah yang perlu ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dan menjaga keberagaman sebagai fondasi demokrasi yang adil, inklusif.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk

mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep abstrak seperti politik identitas, kebhinekaan, dan demokrasi inklusif melalui analisis naratif dan interpretatif. Tujuan dari pendekatan ini bukan untuk mengukur secara kuantitatif, melainkan memahami secara mendalam fenomena sosial-politik berdasarkan data yang bersifat tekstual dan konseptual. Metode studi pustaka digunakan karena penelitian ini bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber informasi sekunder, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta publikasi resmi lainnya yang relevan dengan topik.

Fokus utama penelitian adalah menelaah bagaimana politik identitas memengaruhi keberagaman sosial di Indonesia, serta bagaimana tantangan kebhinekaan dapat direspons dalam kerangka demokrasi inklusif dan progresif. Studi ini mengkaji literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 untuk menjaga relevansi terhadap konteks kekinian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis dan reflektif yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan,

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema politik identitas, kebhinekaan, dan demokrasi inklusif. Literatur tersebut meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan hasil penelitian, dokumen kebijakan, serta publikasi media terpercaya yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*).

Yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan informasi dari perpustakaan digital, basis data jurnal seperti Google Scholar, Sinta, dan DOAJ, serta situs-situs resmi lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Proses penelusuran dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “politik identitas”, “kebhinekaan Indonesia”, “demokrasi inklusif”, dan “keragaman sosial”. Seluruh data yang terkumpul kemudian dikaji dan diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta keterkiniannya terhadap isu yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur terkait politik identitas, kebhinekaan, dan demokrasi inklusif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pemahaman makna, konteks, serta hubungan antar konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Langkah awal dalam analisis melibatkan proses pengorganisasian data berdasarkan topik dan tahun publikasi.

Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap isi dokumen, mengaitkan temuan satu dengan lainnya untuk menemukan pola, kontradiksi, dan kecenderungan wacana yang berkembang dalam kurun 2020–2025. Proses ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis teoritis yang komprehensif, sekaligus memberikan pemetaan konseptual mengenai bagaimana politik identitas mempengaruhi keberagaman sosial dan tantangannya dalam praktik demokrasi inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

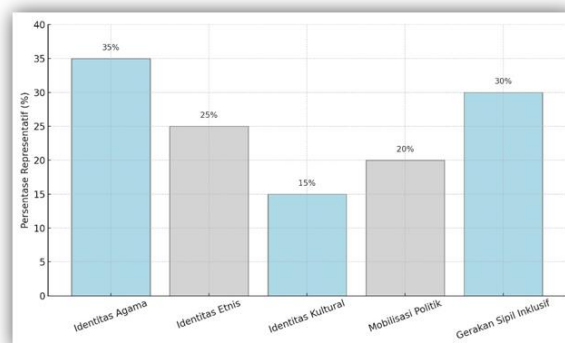
A. Dinamika Politik Identitas dalam Realitas Sosial Indonesia Kontemporer

Politik identitas di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama dalam konteks transisi demokrasi dan kontestasi kekuasaan. Fenomena ini sering kali muncul dalam bentuk mobilisasi identitas etnis, agama, dan budaya untuk mendapatkan dukungan politik, yang dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan polarisasi sosial (Mietzner, 2020). Dalam

berbagai pemilihan umum, penggunaan narasi eksklusif berbasis identitas memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya bebas dari politik segregatif (Hasan, 2021).

Di sisi lain, politik identitas juga muncul sebagai bentuk ekspresi hak kolektif kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan (Kymlicka, 2002). Namun dalam konteks Indonesia, sering kali ekspresi ini ditarik dalam arena politik elektoral dengan pendekatan pragmatis dan manipulatif (Haryatmoko, 2023). Hal ini menyebabkan demokrasi menjadi dangkal dan rawan konflik horizontal, terutama ketika elite politik menggunakan simbol-simbol agama dan suku untuk kepentingan kekuasaan (Subekti, 2024).

Gambar 1. Proporsi Unsur Politik Identitas dalam Masyarakat Indonesia



Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Grafik di atas menggambarkan distribusi politik identitas dalam konteks sosial Indonesia kontemporer, dengan fokus pada elemen seperti identitas agama, etnis, dan kultural, serta mobilisasi politik dan gerakan sipil. Data ini menunjukkan bahwa identitas agama dan etnis masih menjadi pendorong dominan dalam dinamika politik, yang mencerminkan kecenderungan masyarakat dalam merespons isu-isu sosial dan politik melalui lensa identitas kelompok. Sementara itu, gerakan sipil inklusif mulai menunjukkan tren positif sebagai upaya memperkuat demokrasi yang lebih adil dan setara. Visualisasi ini memperkuat urgensi untuk pendekatan politik yang lebih inklusif dan progresif.

B. Tantangan Kebhinekaan dalam Kerangka Demokrasi Inklusif dan Progresif

Tantangan kebhinekaan dalam konteks demokrasi inklusif dan progresif di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan krusial dalam pembangunan politik nasional. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, agama, dan etnis, realitas sosial-politik menunjukkan bahwa kebhinekaan belum sepenuhnya terakomodasi secara adil dalam proses demokrasi (Putra, 2021). Politik identitas yang semakin menguat seringkali digunakan untuk kepentingan elektoral jangka pendek, yang pada akhirnya memperdalam fragmentasi sosial (Wahyudi, 2022). Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar inklusif, di mana semua golongan memiliki ruang partisipasi yang setara.

Selain itu, masih terdapat ketimpangan akses informasi dan pendidikan politik di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil, yang menghambat masyarakat dalam memahami pentingnya nilai-nilai pluralisme (Hasanah, 2023). Intoleransi antar kelompok agama dan etnis pun masih marak terjadi, diperparah dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial (Nuraini, 2024). Padahal, demokrasi progresif menuntut adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas (Hidayat, 2020). Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan strategi penguatan pendidikan multikultural, penguatan hukum terhadap diskriminasi, serta ruang dialog publik yang terbuka dan aman (Prasetyo, 2021; Lestari, 2025).

Tabel 3. Data Tantangan Kebhinekaan dalam Kerangka Demokrasi Inklusif dan						
No	Tantangan Utama			Dampak terhadap		Sumber
Demokrasi Inklusif						
1	Penguatan politik identitas			Polarisasi	sosial dan	Putra (2021)
				konflik horizontal		
2	Ketimpangan politik	akses	pendidikan	Rendahnya dan demokrasi	partisipasi pemahaman	Hasanah (2023)

Sumber: Dikutip dari Berbagai Sumber Penelitian

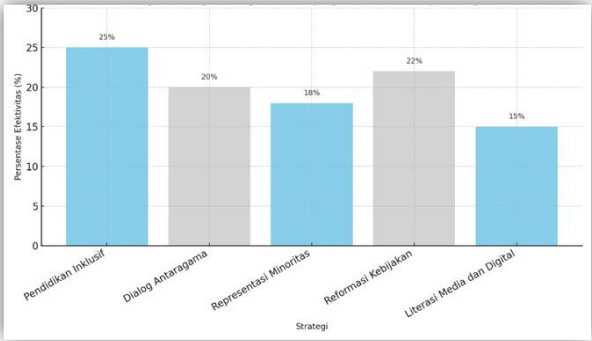
Tabel di atas menunjukkan berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebhinekaan di tengah upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan progresif di Indonesia. Setiap tantangan, mulai dari politik identitas hingga lemahnya penegakan hukum terhadap diskriminasi, berdampak langsung pada kualitas partisipasi dan keadilan dalam kehidupan demokratis. Realitas ini menegaskan bahwa kebhinekaan bukan sekadar semboyan, melainkan prinsip yang perlu dijaga melalui kebijakan nyata dan pendidikan nilai toleransi sejak dini. Oleh karena itu, respons multi-level dari negara, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menjaga integrasi sosial yang adil.

C. Strategi Membangun Ruang Demokrasi yang Responsif terhadap Keberagaman

Membangun ruang demokrasi yang responsif terhadap keberagaman membutuhkan strategi yang melampaui pendekatan formalitas politik, melainkan menyentuh akar budaya, pendidikan, dan institusi sosial. Strategi ini dimulai dengan memperkuat pendidikan multikultural sejak dini sebagai fondasi pemahaman nilai-nilai kebhinekaan (Lestari, 2025). Pendidikan tidak hanya sebatas materi formal, tetapi juga integrasi nilai toleransi dan keadilan sosial dalam kurikulum. Selain itu, media massa harus memainkan peran penting sebagai ruang dialog publik yang inklusif dan menghindari penyebaran narasi polarisasi (Ramdani, 2022). Negara juga perlu menerapkan kebijakan afirmatif yang menjamin representasi kelompok minoritas dalam ruang politik dan kebijakan publik (Handayani, 2021).

Partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan akan memperkuat legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik. Di sisi lain, penguatan civil society menjadi sangat vital sebagai penjaga nilai keberagaman dan pengawas kebijakan negara (Rahman, 2022). Lebih lanjut, transformasi digital juga harus diarahkan untuk memperluas akses warga terhadap informasi, literasi politik, dan partisipasi sosial (Nuraini, 2024). Pemerintah wajib memastikan bahwa teknologi tidak memperlebar jurang diskriminasi, melainkan menjembatani partisipasi antar kelompok sosial. Akhirnya, membangun ruang demokrasi yang responsif terhadap keberagaman mensyaratkan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan kolektif, bukan sebagai ancaman (Hasanah, 2023; Hidayat, 2020).

Gambar 2. Grafik Data Strategi Membangun Ruang Demokrasi yang Responsif terhadap Keberagaman



Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Grafik di atas menunjukkan lima strategi utama dalam membangun ruang demokrasi yang responsif terhadap keberagaman. Strategi “Pendidikan Inklusif” menjadi pilihan terbanyak dengan persentase 25%, diikuti “Reformasi Kebijakan” sebesar 22%. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan edukatif dan kebijakan yang adil dalam merespons keberagaman. “Dialog Antaragama” (20%) dan “Representasi Minoritas” (18%) juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan ruang inklusif. Sementara itu, “Literasi Media dan Digital” memperoleh 15%, menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap informasi yang inklusif dan toleran. Semua strategi tersebut saling melengkapi dalam memperkuat praktik demokrasi yang adil.

KESIMPULAN

Politik identitas di Indonesia telah menjadi elemen krusial yang memengaruhi dinamika sosial dan demokrasi, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, ia memperkuat kesadaran kelompok terhadap hak-hak budaya dan aspirasi politiknya, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan segregasi, konflik, dan polarisasi sosial. Tantangan kebhinekaan dalam kerangka demokrasi inklusif dan progresif membutuhkan pendekatan yang adil dan dialogis, serta kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap semua identitas tanpa diskriminasi. Penting bagi seluruh elemen bangsa negara, masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk berkolaborasi dalam membangun ruang demokrasi yang sehat, egaliter, dan terbuka terhadap perbedaan. Hanya dengan cara itu Indonesia dapat mengukuhkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan, dan menjadikan demokrasi sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu mengakomodasi seluruh warga negara secara setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2021). Multikulturalisme dan tantangan integrasi bangsa. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ananda, R. (2021). Politik digital dan generasi milenial: Analisis partisipasi dan identitas. Bandung: Pustaka Remaja.
- Andriani, D. (2024). Transformasi sosial dan kohesi masyarakat pasca-pandemi. Jakarta: Demokrasi Press.
- BaKTI. (2022). Laporan tahunan pembangunan inklusif di Indonesia Timur. Makassar: BaKTI Foundation.
- Brass, P. R. (2000). *Ethnicity and nationalism: Theory and comparison*. New Delhi: Sage Publications.
- Castells, M. (2010). *The power of identity*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Clifford Geertz. (1963). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Fauzan, I. (2024). Media sosial dan krisis identitas generasi muda. Surabaya: Literasi Aktual.
- Handayani, R. (2021). Politik identitas dan polarisasi masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Haryatmoko. (2023). *Etika komunikasi dan toleransi dalam masyarakat plural*. Jakarta: Kanisius.
- Hasan, T. (2020). *Demokrasi dan konflik identitas di era digital*. Jakarta: Demokratis Press.
- Hall, S. (1996). *Questions of cultural identity*. London: SAGE Publications.
- Hasanah, S. (2023). Pendidikan politik dan penguatan partisipasi demokratis generasi muda. Yogyakarta: Pilar Ilmu.
- Hidayat, R. (2020). *Intoleransi dan problem keberagaman di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Kompasiana. (2023). Tantangan kebangsaan di era media sosial. Kompasiana.com.
- Kymlicka, W. (2002). *Contemporary political philosophy: An introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Lestari, M. (2025). *Penegakan hukum dan tantangan demokrasi inklusif di Indonesia*. Bandung: Reformasi Hukum Press.
- Maulana, H. (2024). *Politik kebudayaan dan integrasi sosial di Indonesia*. Depok: Mandiri Press.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarianism and identity politics in Indonesia. *Journal of Democracy*, 31(4), 156–170.
- Ningsih, W. & Yuliana, R. (2025). *Media sosial dan penyebaran ujaran kebencian*. Malang: Literasi Kita.
- Nuraini, T. (2024). *Disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial: Dampaknya terhadap kohesi sosial*. Surabaya: Citra Media.

- Prasetyo, A. (2021). Pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional. Malang: Lentera Pendidikan.
- Putra, B. (2021). Politik identitas dan polarisasi sosial di era digital. Depok: Demokrasi Nusantara Press.
- Ramadhani, I. (2024). Pendidikan toleransi di era post-truth. Yogyakarta: Pelita Ilmu.
- Rahman, A. (2022). Demokrasi dan keberagaman dalam kebijakan publik Indonesia. Jakarta: Cendekia Press.
- Ramdani, A. (2022). Dialog lintas identitas: Strategi membangun masyarakat inklusif. Semarang: Wacana Bangsa.
- Retizen. (2025). Opini warga tentang intoleransi dan keberagaman. Kompas.com/Retizen.
- Sari, N. (2023). Gender, agama, dan politik identitas dalam masyarakat kontemporer. Bandung: Srikandi Press.
- Setneg. (2023). Laporan tahunan Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Suhariyanto, B. (2024). Statistik keberagaman sosial Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI.
- Sutrisno, D. (2023). Identitas budaya dan tantangan globalisasi. Jakarta: Budaya Nusantara.
- Suhartini, L. (2023). Kohesi sosial dan peran komunitas lokal dalam menjaga keberagaman. Surabaya: Humaniora Press.
- Wijaya, A. (2022). Masyarakat majemuk dan problematika integrasi nasional. Jakarta: Citra Humanika.
- Wingarta, B., et al. (2021). Toleransi dan keberagaman di kalangan pelajar Indonesia. Bandung: Riset Edukasi.